

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan yang terus terjadi secara berkelanjutan di Indonesia yaitu mengenai permasalahan lingkungan tentang pengelolaan sampah. Sampah merupakan suatu permasalahan lingkungan yang selalu menjadi isu terbesar khususnya wilayah perkotaan. Timbulan sampah di daerah kota ini biasanya disebabkan oleh indikator yang saling berkaitan seperti pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, pola konsumsi masyarakat, pola keamanan dan perilaku penduduk, serta permasalahan transportasi.¹ Kondisi ini dihadapi hampir semua kota-kota besar di Indonesia tidak terkecuali juga Kota Jambi yang merupakan pusat aktivitas penduduk dan sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi. Semakin tinggi jumlah penduduk disuatu daerah maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Jika sampah tersebut tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang cukup signifikan.

Data yang di peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi jumlah timbulan sampah per hari di Kota Jambi sebesar 423,45 ton, dari jumlah tersebut ternyata hanya 78 % (330,58 ton) sampah kota Jambi yang terangkut ke TPA Talang Gulo. Sisa yang tidak terangkut sebesar 22% diindikasikan di bakar atau di buang di kebun atau tanah kosong milik

¹ Ashabul Kahfi. *Tinjauan terhadap pengelolaan sampah*. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 4(1), hlm 12-15.

masyarakat, dimanfaatkan oleh bank sampah, pengepul sampah dan lain-lain.²

Kota Jambi merupakan sebuah kota besar yang memiliki jumlah penduduk antara 500.000 hingga 1 juta jiwa yang menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk di kota ini disetiap tahunnya.³ Tercatat dari tahun 2010 hingga 2022, menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk yang mencapai angka 3.016,62 jiwa per kilometer persegi. Kemudian pada rentang waktu 2016-2022, sebaran penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Paal Merah di Kota Jambi. Kecamatan Paal Merah sebagai kecamatan dengan penduduk terbanyak kedua di Kota Jambi dengan total penduduk sebanyak 108.182 jiwa.⁴ Persebaran penduduk ini tersebar di 5 kelurahan yakni Kelurahan Eka Jaya, Kelurahan Paal Merah, Kelurahan Payo Selicah, Kelurahan Lingkar Selatan, dan Kelurahan Talang Bakung.

Kecamatan Paal Merah memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi, yaitu 3.987,54 jiwa per km², dibandingkan dengan Kecamatan Alam Barajo yang sebesar 2.722,47 jiwa per km².⁵ Kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Paal Merah meningkatkan risiko bagi kehidupan masyarakat sekitar, karena area tersebut lebih padat dibandingkan dengan

² Terra Hakim. *Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kota Jambi tahun 2022*. Krinok: Jurnal Arsitektur dan Lingkungan Bina, 1 (2), hlm 2.

³ Erick Mumtaza Juansopatrah. *Analisis Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Eka Jaya*. Universitas Jambi, hlm 2.

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Jambi dalam Angka Tahun 2023, hlm 54.

⁵Ibid., hlm.55

Alam Barajo. Hal ini berimplikasi pada potensi masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan yang lebih besar di wilayah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan pertumbuhan dan kepadatan penduduk tersebut tercatat bahwa Kecamatan Paal Merah memiliki timbulan sampah dengan peningkatan dari tahun ketahun, pada tahun 2019 timbulan sampah di Kecamatan Paal Merah terbanyak ke 2 dengan jumlah timbulan sampah sebanyak 63.968,10 kg/hari tahun 2020 terbanyak ke dengan jumlah timbulan sampah sebanyak 74.134,20 kg/hari dan pada tahun 2021 terbanyak ke 2 dengan jumlah sampah 74.688,6 kg/hari.⁶ Selanjutnya pada tahun 2022 estimasi timbulan sampah sebanyak 75.727,4 kg/hari. Kemudian dengan populasi terbanyak Kecamatan Paal Merah berada di Kelurahan Eka Jaya dengan total penduduk sebesar 31.402 jiwa memiliki estimasi timbulan sampah sebanyak 22 Ton/Hari.⁷

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan tantangan kompleks yang memerlukan solusi yang melibatkan semua pihak terkait, bukan hanya kewenangan pemerintah. Kondisi ini menandakan kompleksitas permasalahan sampah yang membutuhkan pendekatan lain dalam penanganannya. Perubahan paradigma masyarakat mengenai sampah juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi kesadaran dan keterampilan warga untuk pengelolaan sampah dengan penerapan prinsip

⁶ Sumiyarsih. *Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Tahun 2022*. Universitas Jambi, hlm 5.

⁷ Erick Mumtaza Juansopatra, op.cit. hlm 6.

reduce, reuse, recycle (3R) penting dalam penyelesaian masalah sampah melalui pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dimana prinsip tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Untuk memahami perspektif yang beragam terkait dengan pengelolaan sampah, penting untuk merujuk pada penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa studi yang mengulas aspek pengelolaan sampah, namun setiap penelitian memiliki pendekatan dan karakteristik yang unik dalam fokusnya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan Rovario Adriana yang berjudul “Upaya Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengelolaan Sampah (Analisis Implementasi Kebijakan Penggunaan Kantong Ramah Lingkungan Berbayar)”. Model penelitian kualitatif biasanya digunakan di pengamatan dan penelitian sosial. Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik Pada Ritel Modern di Kecamatan Alam Barajo secara keseluruhan belum berjalan dengan baik dengan sebagaimana mestinya. Namun perlahan terus berkembang kearah yang positif. Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi dalam melakukan peran dan upaya belum cukup maksimal.⁸

Kedua, sebuah studi yang dilakukan oleh Terra Hakim yang berjudul *Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kota Jambi tahun 2022*. Penelitian dengan model kualitatif ini mendapatkan hasil yaitu masyarakat Kota Jambi masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap pengelolaan sampah. Hal ini terlihat masih belum disiplinnya masyarakat untuk mematuhi jadwal pembuangan sampah dan memasukkan sampah kedalam bak sampah. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti Bank sampah dan Komunitas Peduli Sampah yang juga masih perlu diperhatikan lagi. Kemudian perlunya penegakan hukum terkait Perda Kota Jambi No 5 Tahun 2020, tentang pengelolaan sampah agar lebih diintensifkan guna memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar seperti pengenaan denda bagi siapa saja yang melanggar.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Erick Mumtaza Juansopatrah dengan judul *Analisis Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Eka Jaya yang dilakukan pada tahun 2023*. Dari penelitian ini menjelaskan tentang pengolahan sampah melalui inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Eka Jaya yaitu bank sampah. Pada pelaksanaannya Ketersediaan Sumber Daya menjadi faktor yang paling menentukan dalam inovasi pengelolaan sampah

⁸ Rovario Adriana. *Upaya Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengelolaan Sampah (Analisis Implementasi Kebijakan Penggunaan Kantong Ramah Lingkungan Berbayar Pada Pasar Modern Di Kecamatan Alam Barajo)*. Universitas Jambi, hlm 69.

berbasis masyarakat di Kelurahan Eka Jaya. Bank Sampah harus memiliki tempat yang memadai untuk mengumpulkan dan memilah sampah, peralatan yang memadai, serta sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola bank sampah. Peran staf bank sampah yang terampil dan berpengetahuan luas dalam pengelolaan sampah sangat krusial dalam memajukan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dengan begitu Bank Sampah Kamboja dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar di Kelurahan Eka Jaya.

Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan terkait dengan sampah selalu menjadi isu besar di wilayah perkotaan salah satunya di Kota Jambi. Terdapat beberapa cara yang ditempuh dalam pengolahan sampah di Kota Jambi. Namun dari hasil penelitian tersebut pula terlihat bahwa pelaksanaannya masih belum optimal dimana masih banyaknya timbulan dan tumpukan sampah pada lingkungan warga dan daerah sekitar tempat penampungan sementara (TPS). Hal tersebut terjadi karena waktu pembuangan sampah ke TPS yang tidak di patuhi oleh masyarakat, sampah yang tidak dimasukkan ke container atau kotak sampah sehingga terlihat ada terus dan meluber keluar dari kotak sampah, luasnya daerah yang harus dilayani oleh petugas kebersihan, terbatasnya sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah Kota Jambi dan penegakan hukum yang belum optimal, mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara pelayanan dengan produksi dan timbulan sampah. Dari permasalahan dan

kondisi tersebut maka peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam terkait dengan pengelolaan sampah di kota jambi dengan sudut pandang yang berbeda.

Metode kolaboratif muncul sebagai pilihan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan sampah, terutama di negara-negara berkembang, di mana tingginya pertumbuhan penduduk menjadi faktor peningkatan permasalahan sampah setiap tahunnya. Menghadapi dinamika pengelolaan sampah seperti ini diperlukan penanganan khusus, penanganan ini harus dilakukan secara bersama-sama antar pemangku kepentingan atau disebut juga *collaborative governance*. Dalam hal ini bukan hanya dapat melihat peran pemerintah dan masyarakat saja dalam upaya mengatasi permasalahan sampah namun juga ada pihak swasta yang juga akan turut berperan didalamnya. Metode kolaborasi tersebut sudah dilakukan di Kecamatan Paal Merah tepatnya di Kelurahan Eka Jaya yaitu bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi serta PT. PLN UPDK Jambi berinisiasi untuk membuat Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) KSM Makmur Jaya yang berbasiskan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Eka Jaya.⁹

Tempat Pengolahan Sampah 3R adalah tempat berlangsungnya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran

⁹ Dante, "Hasil kolaborasi TPS 3R KSM Makmur Jaya dengan PLN dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi" Sumber; <mailto:https://matapublik.co/hasil-kolaborasi-tps-3r-ksm-makmur-jaya-dengan-pln-dan-dinas-lingkungan-hidup-kota-jambi/> (diakses pada 12 Desember 2023, pukul 00:17)

ulang dikawasan tertentu. Konsep utama dari TPS 3R ini adalah untuk mengurangi kuantitas, dan/atau memperbaiki karakteristik sampah yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPS 3R diharapkan dapat berperan dalam menjamin kebutuhan lahan yang semakin kritis untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan nasional untuk meletakkan TPA sampah pada hierarki terbawah, sehingga meminimalisasi residu saja untuk diurug dalam TPA.¹⁰ Di TPS3R KSM Makmur Jaya Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal merah tersebut melakukan pengelolaan sampah dengan dukungan dari PT. PLN UPDK Jambi dalam hal penyedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh TPS3R KSM Makmur Jaya. Salah satunya yaitu motor armada yang digunakan untuk mengangkut sampah, sehingga petugas dari TPS3R bisa mengangkut sampah nasabah.

Dari segi kebaruan belum pernah ada dilakukan sebelumnya penelitian terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Jambi yang melihat dari sudut pandang *collaborative governance*. Peneliti ingin melihat bagaimana proses kolaborasi tersebut dalam tata kelola pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Lokasi penelian di TPS3R KSM Makmur Jaya di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi juga untuk pertama kalinya dilakukan. Hal tersebut kemudian menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk itu

¹⁰ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Petunjuk Teknis Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R. (Jakarta : Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2017), hlm 1-2.

peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “*Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi*”.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk menegaskan kembali masalah-masalah yang akan diteliti sehingga dapat menentukan pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan dari penelitian, berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tata Kelola dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Paal Merah Berdasarkan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*)?
2. Bagaimana Proses *Collaborative Governance* dalam Tata Kelola Pengelolaan Sampah di Kecamatan Paal Merah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mencapai tujuan agar peneliti dapat memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tata Kelola dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Paal Merah Berdasarkan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*)
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses *Collaborative Governance* dalam Tata Kelola Pengelolaan Sampah di Kecamatan Paal Merah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menambah pengetahuan, wawasan serta memberikan sumbangsih guna untuk pengembangan Ilmu pemerintahan, serta diharapkan dapat menjadi referensi/rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pemerintahan khususnya yang berkenaan dengan proses *collaborative governance* dalam tata kelola pengolahan sampah di Kecamatan Paal Merah.

1.5. Landasan Teori

Teori merupakan alat yang akan digunakan peneliti dalam menganalisis masalah yang nantinya ditemukan di lapangan. Beberapa teori digunakan untuk mendeskripsikan dan memecahkan masalah di lapangan sesuai dengan topik yang akan diteliti. Berikut teori yang peneliti gunakan:

1. Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan kegiatan atau strategi dalam ranah publik yang mempertemukan para pemangku

kepentingan dari berbagai sektor untuk merancang dan melaksanakan suatu kebijakan atau program. Meningkatnya minat terhadap mekanisme collaborative governance bersumber dari potensi manfaat melibatkan berbagai aktor untuk menangani masalah kapasitas dan legitimasi pemerintahan¹¹. Definisi *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash yaitu sistem yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik atau pemerintahan secara langsung melibatkan sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi pada hasil keputusan bersama dan musyawarah serta bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik dengan mengelola program dan aset publik.

*A Governing Arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.*¹²

Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentinyan masyarakat. Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama

¹¹ Muhammad Noor, Falih Suaedi, Antun Mardiyanta. *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. (Yogyakarta: Bildung), hlm 41.

¹² Chris Anshell & Alison Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice*. University of California, Berkeley, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18:543–571, 2007, hlm 544.

antar actor, antar organisasi atau antara institusi dan masyarakat serta swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent.

Konsep dan definisi tersebut kemudian banyak dijadikan acuan oleh akademisi lainnya dalam membahas *collaborative governance*. Selanjutnya Emerson, Nabatchi dan Balogh menawarkan definisi *collaborative governance* yang lebih luas yaitu sebagai berikut:

*“Define collaborative governance broadly as the processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies level of government, and/or the public, private and civil spheres in order to carry out public purpose that could not otherwise be accomplished,”*¹³

Collaborative governance merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan/atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja, substansi dari *collaborative governance* tidak hanya sebuah peraturan yang beberapa lembaga dalam sebuah

¹³ Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22 (1): 1-29, hlm 2.

kepentingan, tetapi lebih kepada proses yang bersifat transformative dan berlaku dalam jangka panjang.

Maknanya yaitu *Collaborative governance* sebagai proses dan struktur dari pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level pemerintahan dan atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama. Dengan kata lain kolaborasi membahas mengenai kerjasama dua tau lebih stakeholder untuk mengelola sumber daya yang sama yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual.

Kemudian Thomson and Perry mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai berikut:

“Collaboration is a process in wich autonomous or semi-autonomous actors nteract through formal and informal negotiation, joinly creating rules and structures governing their relationship and ways to act or decides on the issues that brought them together; it is a process involving shared norms and mutually beneficial interactions”¹⁴

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa kolaborasi merupakan upaya bersama yang memiliki aspek multidimensional. Pertama, terdapat keterlibatan dua atau lebih aktor yang tidak harus selamanya memiliki otonomi penuh. Kedua, terdapat interaksi baik yang bentuknya formal maupun informal melalui upaya negosiasi

¹⁴ Ann Marie Thomson, James L Perry. (2006). *Collaboration Processes: Inside the Black Box. Public Administration Review* 66 (s1):20-32, hlm 23

di antara para partisipan. Ketiga, bentuk kerja sama yang terjalin dalam satu jaringan kerja berlangsung pada suatu struktur hubungan yang menjadi wahana bagi mereka untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Keempat, dalam bentuk kerjasama yang terjalin, berlangsung sebuah proses yang ditandai oleh adanya upaya berbagi nilai serta manfaat bersama.

Dengan merangkum ketiga definisi tersebut, *collaborative governance* dapat diartikan sebagai suatu sistem pengaturan di mana lembaga-lembaga publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan formal. Pendekatan ini berfokus pada hasil bersama, melibatkan aktor-aktor dari berbagai level, dan mengusung prinsip transformative untuk mencapai tujuan publik. Selain itu, kolaborasi diwujudkan melalui proses negosiasi formal dan informal yang menciptakan aturan dan cara-cara bersama dalam penyelesaian masalah.

Collaborative Governance sederhananya diartikan sebagai suatu pendekatan dalam pengelolaan sumber daya atau penyelesaian masalah yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Model teori *Collaborative Governance* oleh Ansell and Gash menyoroti pentingnya kerjasama dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam

pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Praktek kolaborasi itu sendiri dilaksanakan melalui beberapa tahapan, Ansell and Gash kemudian membagi tahapan proses kolaborasi sebagaimana berikut:

1) Dialog Tatap Muka (*Face To Face*)

Semua tata kelola kolaboratif dibangun atas dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan. Sebagai sebuah proses yang berorientasi pada konsensus, dialog tatap muka adalah sangat penting tetapi tidak cukup untuk kolaborasi. Dialog tatap muka lebih dari sekedar media negosiasi. Ini adalah inti dari proses memecahkan stereotip dan hambatan komunikasi lain yang mencegah eksplorasi keuntungan bersama.

2) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Kurangnya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan adalah titik awal yang umum bagi pemerintah kolaboratif. Proses kolaboratif tidak hanya sekedar negosiasi tetapi juga membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Membangun kepercayaan sering kali menjadi hal yang menonjol dari proses kolaboratif awal dan bisa sangat sulit untuk dikembangkan.

3) Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to the Process*)

Tingkat komitmen pemangku kepentingan untuk kolaborasi merupakan variabel penting dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan. Komitmen tentunya sangat erat kaitannya dengan motivasi asli untuk berpartisipasi dalam pemerintahan kolaboratif. Komitmen proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa tawar-menawar dengan niat baik untuk keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai kebijakan yang diinginkan.

4) Pemahaman Terhadap Keputusan Bersama (*Shared Understanding*)

Dalam proses kolaborasi, pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang hal-hal yang dapat mereka capai bersama. Pemahaman bersama berarti juga seperti tujuan bersama, berbagi visi, arah yang jelas dan strategis. Pemahaman bersama juga dapat menyatakan persetujuan tentang sebuah definisi dari masalah atau mengenai kesepakatan solusi yang relevan untuk menangani sebuah masalah.

5) Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Kolaborasi lebih mungkin terjadi ketika kemungkinan tujuan dan keuntungan dari kolaborasi relatif konkret dan kecil. Meskipun hasil sementara dapat mewakili hasil yang nyata, namun bagi pemangku

kepentingan tidak dapat mengantisipasi kemenangan kecil dalam sebuah proses kolaborasi. Kemenangan kecil mungkin bukan strategi tepat untuk membangun kepercayaan di mana pemangku kepentingan memiliki tujuan lebih ambisius yang tidak dapat dengan mudah diuraikan menjadi hasil. Dengan situasi ini, kepercayaan dapat dibangun dengan eksploitasi bersama sejak dini.¹⁵

Pada penelitian ini menggunakan teori model *collaborative governance* oleh Ansell and Gash dengan pertimbangan untuk menganalisis dan memahami dinamika interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya pengelolaan sampah di Kecamatan Paal Merah. Pendekatan ini bertujuan untuk memerinci aspek-aspek kunci dalam upaya kolaboratif tersebut. Pertama-tama, melalui komunikasi langsung, penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana interaksi interpersonal antara berbagai pemangku kepentingan dapat memengaruhi pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan. Selanjutnya, analisis akan difokuskan pada pembangunan kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat, memperhatikan bagaimana kepercayaan ini menjadi fondasi penting untuk kerjasama berkelanjutan. Proses mencapai komitmen akan dianalisis untuk memahami bagaimana perencanaan dan implementasi kebijakan dapat melibatkan semua

¹⁵ Chris Ansell & Alison Gash, op.cit, hlm 558-561.

pemangku kepentingan dengan berbagai perspektif. Pemahaman atas keputusan bersama akan diperinci untuk menyoroti bagaimana transparansi dan partisipasi aktif dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Akhirnya, hasil sementara kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Paal Merah akan dievaluasi, menyoroti dampak positif yang dapat dicapai melalui pendekatan *collaborative governance* ini.

Penerapan teori tersebut dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman ilmiah yang mendalam terkait dengan aspek-aspek kunci dalam penerapan *Collaborative Governance*. Serta memahami tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam *collaborative governance* dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Paal Merah melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, dengan *Collaborative Governance* memungkinkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, industri, masyarakat setempat, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Model ini menawarkan solusi yang melibatkan berbagai perspektif dan kepentingan, sehingga memperkuat pelaksanaan kebijakan sampah yang lebih efektif dan akuntabel, sekaligus meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil.

2. Pengelolaan Sampah

Menurut kamus istilah lingkungan sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis¹⁶. Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, menjelaskan perubahan sistem pengelolaan sampah dimana pengelolaan sampah pada Pasal 1 ayat 5 adalah mengatur proses yang terstruktur, menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk pengurangan dan pengelolaan sampah. Untuk meminimalisir dan mencegah pencemaran, sampah dapat diolah dan menjadi sumber daya. Pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui mengurangi (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*) dengan peran serta (partisipasi) masyarakat. Sampah dipisahkan dari sumbernya dan memiliki manfaat ekonomi dan bagi lingkungan karena semua proses pengolahan sampah melibatkan proses pemilahan, penggunaan kembali dan daur ulang.

Secara umum, pengelolaan sampah memiliki tiga tahap yaitu, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan. Pengelolaan sampah yang mana telah mengalami pergeseran paradigma dan arah dalam pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan. Pengelolaan sampah lebih difokuskan untuk meminimalkan

¹⁶ Yudiyanto, Era Yudistira & Atika Lusi Tania. *Pengelolaan sampah pengabdian pendampingan di Kota Metro*. (Metro, Indonesia: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro dengan Sai Wawai Publishing), hlm 9.

sampah pada sumbernya semaksimal mungkin sebelum diangkut ke TPA. Oleh karena itu, ruang lingkup pengelolaan tidak hanya didasarkan pada proses TPA, tetapi juga berfokus pada pengelolaan sampah yaitu memilah sampah, kemudian mengolahnya menjadi produk yang bermanfaat, dan akhirnya mengirimkan sisa atau hanya sisa sampah ke TPA.

Pengumpulan sampah adalah menjadi tanggung jawab dari masing-masing rumah tangga atau institusi yang menghasilkan sampah. Oleh sebab itu mereka ini harus membangun atau mengadakan tempat khusus untuk mengumpulkan sampah. Kemudian dari masing-masing tempat penampungan sementara (TPS) sampah, dan selanjutnya ke tempat penampungan akhir (TPA). Tempat Pengolahan Sampah 3R adalah tempat berlangsungnya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan daur ulang di kawasan tertentu.¹⁷

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah yang dilakukan berupa rangkaian peadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang dimana TPS 3R ini merupakan bagian dari sub-sistem pengolahan pada skala komunal yang berbasis masyarakat. Konsep utama dari TPS 3R ini adalah untuk mengurangi kuantitas, dan/atau memperbaiki

¹⁷ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Petunjuk Teknis Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R. (Jakarta : Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2017), hlm xiii.

karakteristik sampah yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPS 3R diharapkan dapat berperan dalam menjamin kebutuhan lahan yang semakin kritis untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan nasional untuk meletakkan TPA sampah pada hierarki terbawah, sehingga meminimalisasi residu saja untuk diurug dalam TPA. Lebih lanjut TPS 3R sebagai upaya penanganan sampah dari sumbernya untuk mengurangi timbulan sampah dengan cara menggunakan kembali barang-barang yang dapat digunakan dan didekompisisi secara biologi dan serta menerapkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dengan melakukan kegiatan pengolahan sampah organik dan anorganik. Pengolahan sampah 3R adalah upaya pengurangan sampah, melalui program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle*.

1) *Reduce* (pengurangan sampah/hemat pemakaian)

Reduce (pengurangan sampah/hemat pemakaian), yaitu kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang atau produksi berlebih, tidak membiarkan tumpukan sampah berlebihan dan tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Contoh dari pengurangan sampah dapat berupa mengurangi barang yang tidak mudah untuk didaur ulang biasakan menggunakan wadah yang dapat dipakai berkali-kali seperti tas belanja dan lain sebagainya.

2) *Reuse* (penggunaan kembali/guna ulang)

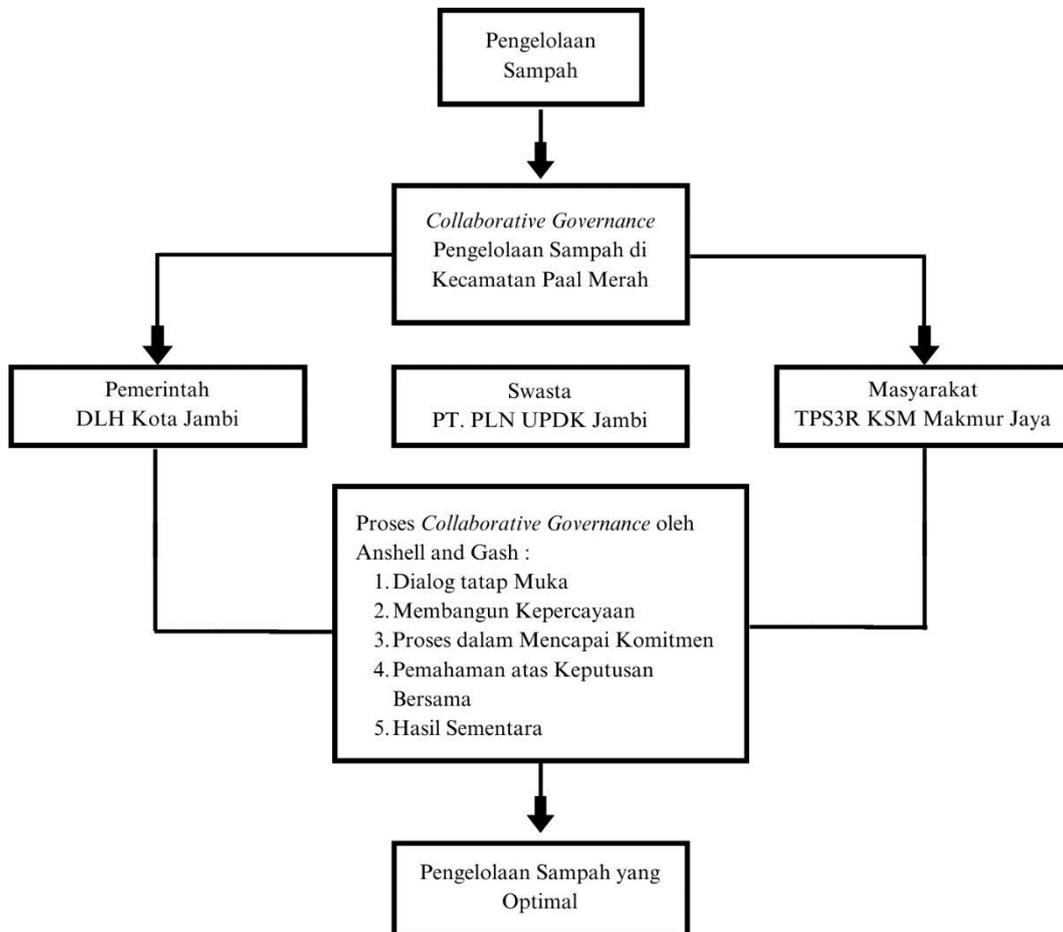
Reuse (penggunaan kembali/guna ulang), yaitu kegiatan menggunakan kembali barang atau sisa sampah yang masih layak pakai dan bisa digunakan kembali. Contoh dari penggunaan kembali dapat berupa menggunakan baju bekas untuk dijadikan kain lap atau keset, plastik bekas kresek untuk kantong sampah dan lain sebagainya

3) *Recycle* (mendaur ulang)

Recycle (mendaur ulang), yaitu kegiatan mengolah kembali dengan memanfaatkan sampah untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Contohnya dapat berupa pengolahan limbah organik menjadi kompos dan limbah anorganik menjadi kerajinan yang bernilai jual.¹⁸

¹⁸ Risma Dewi Arisona. *Pengelolaan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Pada Pembelajaran IPS Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan*. Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam, 3(1), hlm 5-8.

1.6. Kerangka Pikir



Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungannya dengan perumusan masalah. Produksi sampah terus meningkat dan menjadi persoalan nasional yang menjadi tanggung jawab semua pihak dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam penanganannya, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah di Kecamatan Paal Merah menjadi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Dalam sebuah kolaborasi hal terpenting terletak pada proses kolaborasi yang dilakukan antar stakeholders.

Dalam konsep ini kolaborasi didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengintegrasikan berbagai sektor, termasuk pemerintah dan non-pemerintah, dengan tujuan mengelola, merencanakan, dan mengatur bersama segala urusan, dengan maksud mencapai hasil yang optimal secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan sampah secara kolaboratif tidak terpisahkan dengan *governance* yang merupakan suatu hubungan yang tak terpisahkan yang terdiri atas tiga pihak *governance* mencakup *state* (negara/pemerintahan), *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat).

Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana proses collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Adapun yang termasuk dalam pengelolaan sampah tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, PT PLN UPDK Jambi, dan TPS 3R KSM Makmur Jaya yang dikelola oleh masyarakat. Untuk melihat keberhasilan dari berjalannya proses collaborative governance pada penelitian ini menggunakan indikator teori anshell and gash yaitu: Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Proses dalam mencapai Komitmen, Pemahaman atas keputusan bersama, dan Hasil sementara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Paal Merah. Implikasi temuan ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan strategi pengelolaan sampah di tingkat lokal, sekaligus memperkuat konsep pemerintahan kolaboratif sebagai pendekatan yang relevan dan berdaya guna dalam menangani tantangan lingkungan di masa depan.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan oleh Sofyan Syarif sebagai tata cara yang ditempuh untuk melakukan penelitian, yaitu merupakan prosedur bagaimana mendapatkan, merumuskan kebenaran dari objek atau fenomena yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

¹⁹ Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.9

metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana *Collaborative Governance* dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Dalam hal ini memerlukan survey dan wawancara langsung di lapangan kepada objek penelitian terkait agar permasalahan yang dinamis dapat terpecahkan.

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna daripada generalisasi²⁰. Jenis penelitian yang digunakan dalam mengenai “*Collaborative Governance* dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi “, yakni Kualitatif deskriptif. Agar permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dapat digambarkan secara terperinci dan jelas. Selain itu juga untuk menjawab permasalahan yang di angkat dalam

²⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&B*, (Bandung:Penerbit Alfabeta,2013). Hlm 9.

penelitian ini membutuhkan observasi, Wawancara secara mendalam kepada sasaran penelitian.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. Adapun lokasi penelitian yang dimaksud adalah di Kelurahan Eka Jaya yang terletak di Kecamatan Paal Merah. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Kecamatan Paal Merah merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Kota Jambi. Kemudian dengan populasi terbanyak Kecamatan Paal Merah berada di Kelurahan Eka Jaya dengan total penduduk sebesar 31.402 jiwa memiliki estimasi timbulan sampah sebanyak 22 Ton/Hari. Sehingga sangat mendukung terkait dengan akses informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pembatasan masalah mengenai objek yang akan diteliti. Dengan adanya batas-batas masalah yang jelas maka dapat mengarahkan dan membimbing penelitian agar lebih terarah dan terperinci. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah *Collaborative Governance* dalam Pengolahan Sampah di TPS3R KSM Makmur Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data Primer dan sumber data Sekunder:

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data²¹. Data primer adalah data pokok yang di perlukan dalam penelitian. Adapaun data primer ini peneliti dapatkan langsung dari sumber aslinya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau bisa dikatakan juga data berasal dari penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data primer didapat baik melalui wawancara mendalam kepada informan atau bisa juga dari pengamatan secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data²². Sumber data sekunder yaitu data yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku- buku, artikel, internet atau media massa yang relevan

²¹ *.Ibid.*, hlm 225.

²² *.Ibid.*, hlm 225.

dengan fokus penelitian dan juga hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik pada penelitian ini penentuan informan peneliti menggunakan cara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu²³. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.

Informan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan topik penelitian. Mereka adalah orang-orang yang dianggap mengetahui secara jelas tentang bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam Pengolahan Sampah di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Informan yang akan menjadi sumber informasi bagi penulis dalam penelitian ini, yakni:

Tabel 1.1. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Firman Ariyanto	Kasi Pengendali Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan Sampah DLH Kota Jambi
2	Endah	Bidang Pengawasan Lingkungan PT. PLN UPDK Jambi
3	Kabul Efendi	Ketua Pengelola TPS3R KSM Makmur Jaya
4	Suhartono	Humas TPS3R KSM Makmur Jaya
5	Jumida	Masyarakat di RT 48

²³ *Ibid.*, hlm 85.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar²⁴. Artinya observasi dalam hal ini dilakukan untuk melihat kenyataan yang ada di lapangan. Peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga

²⁴ *Ibid.*, hlm.145.

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam²⁵. Sederhananya wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan atau dengan kata lain melakukan pengumpulan data bertatap muka dengan responden.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain²⁶.

²⁵ *Ibid.*, hlm.231.

²⁶ *Ibid.*, hlm.240.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Teknik pengelolaan data yang akan dilakukan menggunakan model analisis data Miles & Hubberman mengemukakan ada tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif.

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi Data yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang tereduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan²⁷.

b. Paparan Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart dan sejenisnya, yang mana dengan kegiatan tersebut dapat mempermudah

²⁷ *Ibid.*, hlm.247.

untuk memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan²⁸.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya²⁹.

1.7.8. Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Triangulasi data dalam penelitian kualitatif ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu³⁰. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis triangulasi metode yaitu suatu metode yang melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengecek kebenaran informasi sehingga mendapat derajat kepercayaan yang valid.

²⁸ *Ibid.*, hlm.249.

²⁹ *Ibid.*, hlm.252.

³⁰ *Ibid.*, hlm.273.